

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN MUNA
SULAWESI TENGGARA**

Charlos Reinhard Onthoni

NPP. 29.1576

*Asdaf Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: charlosreinhard.cr@gmail.com

ABSTRACT

Problem: The implementation of the Vaccination Program in Muna Regency as of August 23, 2021, only 27,673 people who have administered the first dose of vaccine and only 14,304 people who have administered the second dose of vaccine, this is even less than 20% of the total population of Muna Regency who received the vaccine. totaling about 169,242 inhabitants. **Purpose:** This study aims to describe the process of implementing the Covid-19 Vaccination Program carried out by the Muna Regency Government, to find out the obstacles faced by the Muna Regency government in implementing the vaccination program, and to determine the actions of the Muna Regency government in overcoming the obstacles that occurred. **Method:** This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The research will begin by identifying the theme, collecting data and analyzing the data, and will continue gradually to understand and understand certain themes, symptoms or problems, so that the research can run smoothly. **Result:** The implementation of the Covid-19 vaccination program carried out by the Muna district government, can be categorized has been maximized, it can be seen from the achievement of the number of people who have carried out vaccination, which is able to reach 70%. During the current pandemic, the local government of Muna district needs to innovate, how to get the community to participate in the COVID-19 vaccination program carried out by the local government. **Conclusion:** Although it can be categorized as good, in implementing the COVID-19 vaccination program, the Muna district government still faces several obstacles, namely the culture of public trust in Muna district and the geographical conditions of Muna district and the spread of hoax news about vaccination. In dealing with obstacles that occur in the field, the Muna district government seeks a familial approach with community and religious leaders, increasing the number of vaccination points, running programs from the central government, in overcoming the covid 19 vaccine hoax through 2 approaches, namely the soft approach to strengthen public insight. , through digital

literacy, and the second hard approach, is an approach in the form of blocking hoax content and negative content, and law enforcement.

Keywords: Implementation, Covid-19, Vaccination, Community, Health

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan Program Vaksinasi di kabupaten Muna terhitung dari tanggal 23 Agustus 2021 masyarakat yang telah melaksanakan vaksin dosis pertama hanya sekitar 27.673 jiwa dan masyarakat yang telah melakukan vaksin dosis kedua hanya sekitar 14.304 jiwa, ini bahkan hanya di bawah 20% dari jumlah populasi penduduk kabupaten muna yang berjumlah sekitar 169.242 jiwa. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna, untuk mengetahui kendala kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten Muna dalam pelaksanaan program vaksinasi, dan untuk mengetahui tindakan pemerintah kabupaten Muna dalam mengatasi kendala yang terjadi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian akan dimulai dengan mengidentifikasi tema, mengumpulkan data dan menganalisis data, dan dilanjutkan secara bertahap untuk memahami dan memahami tema, gejala atau masalah tertentu, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. **Hasil/Temuan:** Implementasi program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Muna, dapat dikategorikan sudah maksimal, dapat dilihat dari capaian jumlah penduduk yang telah melaksanakan Vaksinasi mampu mencapai 70%. Di masa pandemi saat ini, pemerintah daerah kabupaten Muna perlu berinovasi, bagaimana agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi covid 19 yang dilaksanakan pemerintah daerah. **Kesimpulan:** Meskipun dapat dikategorikan sudah baik, dalam implementasi program vaksinasi covid 19, pemerintah kabupaten Muna masih mendapatkan beberapa kendala yaitu budaya kepercayaan masyarakat kabupaten Muna dan kondisi geografis kabupaten Muna serta penyebaran berita hoax tentang vaksinasi. Dalam menghadapi kendala – kendala yang terjadi di lapangan, Pemerintah kabupaten Muna berupaya pendekatan kekeluargaan Bersama tokoh tokoh masyarakat dan agama, penambahan jumlah titik vaksinasi, menjalankan program dari pemerintah pusat, dalam mengatasi hoax vaksin covid 19 melalui 2 pendekatan, yaitu *soft approach* memperkuat wawasan masyarakat, lewat literasi digital, dan yang kedua *hard approach*, merupakan, pendekatan yang berupa pemblokiran konten hoax dan konten negatif, dan penegakan hukum.

Kata Kunci : Implementasi, Covid-19, Vaksinasi, Masyarakat, Kesehatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia masih terus melaporkan adanya penambahan kasus harian, mulai dari jumlah yang telah sembuh, sampai jumlah pasien yang telah meninggal dunia akibat Covid-19. Menurut

Satgas penanganan Covid-19, per 1 September 2021 pukul 12.00 WIB, terdapat 10.337 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Diawali dengan diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020, peningkatan ini membuat total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 4.100.138. Data yang sama menunjukkan bahwa banyak kasus Covid-19 yang sembuh. Dalam sehari, jumlahnya bertambah 16.394 kasus. Dengan demikian, jumlah kasus Covid-19 yang sembuh sebanyak 3.776.891. Namun, jumlah pasien yang meninggal akibat terpapar Covid-19 juga terus meningkat, dari 31 Agustus hingga 1 September, total 653 pasien Covid-19 meninggal. Akibatnya, jumlah kematian akibat Covid-19 mencapai 133.676 sejak awal pandemi. Dengan data tersebut, saat ini terdapat 189.571 kasus aktif Covid-19. Kasus aktif merujuk pada pasien yang masih dinyatakan positif virus corona dan dirawat di rumah sakit atau diisolasi sendiri. Pemerintah juga menyebutkan, saat ini ada 251.359 orang berstatus dalam pengawasan. Saat ini negara – negara di dunia termasuk Indonesia sedang berupaya melakukan riset - riset untuk menghasilkan vaksin dari Covid – 19. Pemerintah harus mampu mengatur dan mengendalikan dalam pemberian vaksin kepada masyarakat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (covid-19) karena selain berguna dalam pengendalian penyebaran Covid – 19, vaksin akan menjadi komoditi yang paling sering dicari dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pemberian vaksin tersebut dimulai dengan diberikannya vaksin secara empat tahap epada Presiden serta pejabat, tokoh agama, organisasi profesi, dan lain-lain. Vaksinasi dapat dilakukan setelah mendapatkan Izin Penggunaan Darurat (EUA) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Perintah Keagamaan Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk menyelesaikan rencana vaksinasi COVID-19 di 34 provinsi, yang mencakup total populasi 181,5 juta orang. Rencana vaksinasi selama 15 bulan akan dilakukan dalam dua tahap. Kombinasi vaksin, penerapan disiplin 3M (pakai masker, jaga jarak, cuci tangan) dan penguatan 3T (tracking, testing dan treatment) merupakan langkah efektif menekan penyebaran COVID-19. Sampai saat ini terhitung sudah 7 bulan program vaksinasi telah dilaksanakan namun hanya sekitar 65 juta jiwa yang baru menerima vaksin dosis pertama dan hanya sekitar 37 juta jiwa yang telah melaksanakan vaksin lengkap, ini masih kurang dari 30% dari jumlah populasi masyarakat Indonesia.

Vaksinasi dosis pertama di provinsi Sulawesi Tenggara sudah mencapai 30,09% jumlah ini setara dengan 602.600 masyarakat yang telah vaksin dari target yang telah ditetapkan sebanyak 2 juta jiwa, sedangkan untuk vaksin dosis kedua masih mencapai 16.21% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kelompok sasaran, rincian vaksinasi untuk mengatasi virus Covid-19 di provinsi sulawesi tenggara yaitu kelompok SDM kesehatan dengan target 20.440 jiwa, berhasil dilakukan vaksinasi sebanyak 24.772 jiwa (121.22% dari target) kemudian untuk vaksinasi dosis kedua telah mencapai 22.840 jiwa (111.75% dari target). Vaksinasi pada kelompok sasaran petugas publik telah mencapai 232.490 jiwa (94.12% dari target) sedangkan dosis kedua masih mencapai 141.250 jiwa (59.62% dari target). Vaksinasi kepada kelompok lansia ditargetkan sebanyak 157.300 jiwa, untuk dosis pertama telah diberikan kepada 16.740 jiwa (10.64% dari target) sedangkan untuk vaksin dosis

kedua baru mencapai 9.777 jiwa (6.22% dari target). Vaksinasi kepada masyarakat umum yang rentan ditargetkan sebanyak 1.28 juta jiwa, untuk dosis pertama telah diberikan sebanyak 300.370 jiwa (24.71% dari target) sedangkan untuk vaksin dosis kedua baru mencapai 123.990 jiwa atau masih 10.71% dari target yang telah ditetapkan. Vaksinasi yang dilakukan untuk kelompok remaja usia 12 – 17 Tahun, ditargetkan sebanyak 296.410 jiwa, namun pemberian pada dosis pertama masih mencapai 11.870 jiwa (4% dari target) dan untuk dosis kedua masih mencapai 7.387 jiwa ini masih 2.49 persen dari target.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Di kabupaten Muna terhitung dari tanggal 23 Agustus 2021 masyarakat yang telah melaksanakan vaksin dosis pertama hanya sekitar 27.673 jiwa dan masyarakat yang telah melakukan vaksin dosis kedua hanya sekitar 14.304 jiwa, ini bahkan hanya di bawah 20% dari jumlah populasi penduduk kabupaten muna yang berjumlah sekitar 169.242 jiwa. Tabel dibawah menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat kabupaten Muna yang belum menerima vaksin terlebih pada dosis kedua, hal ini menjelaskan adanya kendala atau faktor penghambat, sehingga pemberian vaksin masih belum tersalurkan dengan baik kepada seluruh masyarakat kabupaten Muna.

Tabel 1.
Tabel Vaksinasi Kabupaten Muna

Golongan Masyarakat	Sasaran	Vaksin	
		Dosis 1	Dosis 2
Tenaga Kesehatan	2121	2392 (112.78%)	2237 (105.47%)
Pelayan Publik	18933	18096 (95.58%)	10817 (57.13%)
Lansia	21148	21148 (35.1%)	133 (0.63%)
Masyarakat	99615	6545 (6.57%)	998 (1.00%)
Remaja	27425	289 (1.05%)	119 (0.43%)
TOTAL	169242	27673 (16.35%)	14304 (8.45%)

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Muna, 2021

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks implementasi maupun kebijakan vaksinasi Covid-19. Penelitian pertama oleh M. Akbar, dkk dengan judul *Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya*. Penelitian kualitatif deskriptif ini menunjukkan hasil implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya cukup memenuhi variabel tersebut. Penelitian ini secara garis besar memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan

dilaksanakan yaitu mendeskripsikan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 dan juga memperhatikan beberapa hambatan-hambatan yang dialami serta upaya mengoptimalkan program vaksinasi. Selanjutnya oleh Idil Akbar dengan judul *Vaksinasi Covid 19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik*. Penelitian kualitatif ini menunjukkan hasil bahwasanya perspektif ekonomi politik nasional pada dasarnya memandang negara sebagai pusat dari berbagai kelompok kepentingan (swasta), dan masyarakat menjadi kepentingan nasional. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perspektif ekonomi politik di dalam memandang fungsi negara dan pemerintah pada rencana vaksinasi Covid-19, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program vaksinasi. Ketiga oleh Susi Artuti Erda Dewi dengan judul *Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19*. Penelitian deskripsi kualitatif ini menunjukkan hasil rencana berhasil Vaksinasi Covid-19 tergantung pada Banyak faktor yang mempengaruhinya Salah satu faktor tersebut adalah Komunikasi publik. Penelitian ini membahas tentang bagaimana komunikasi public terkait vaksinasi Covid-19, sehingga dapat membangun pola pikir masyarakat untuk tetap mematuhi protocol yang telah ditentukan, lokus penelitian ini juga dilaksanakan di provinsi Riau.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat dari George Edward III mengenai teori implementasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna, mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Muna dalam menjalankan Program Vaksinasi Covid-19, dan mengetahui solusi yang diambil pemerintah kabupaten Muna dalam mengatasi kendala – kendala saat menjalankan Program Vaksinasi Covid-19.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data dengan sumber informan penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular, Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat, Kepala Puskesmas Wapunto, Kepala Puskesmas Batalaiworu, Dokter Umum, Tokoh Masyarakat Kabupaten Muna, dan Ketua Satuan Tugas Covid-19 kab. Muna. Informan tersebut menggunakan teknik *purposive sampling* Data-data tersebut dikumpulkan berdasarkan sumber utama dan sekunder dengan menggunakan teknik berupa wawancara

semiterstruktur, observasi, serta dokumentasi Adapun analisisnya menggunakan pendapat Richard M. Steers mengenai teori efektivitas organisasi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni, reduksi data, *display* data, serta verifikasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dianalisis implementasi kebijakan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara dengan menggunakan pengukuran/indikator yakni pendapat George Edward III mengenai teori implementasi. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi atau cara penyampaian informasi; transmisi mengacu pada cara menyampaikan sebuah informasi yang efektif, dan dapat dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Dalam proses pelaksanaan vaksinasi Covid – 19 pasti ada suatu proses komunikasi yang sangat berhubungan. Pada pertengahan bulan februari tahun 2021, disitu awal pemerintah kabupaten muna melakukan vaksinasi kepada masyarakat, dan sebelum itu, sudah dilakukan vaksinasi kepada kelompok tenaga Kesehatan, Guru, PNS, dan TNI POLRI. Sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang lain, bahwa vaksin Covid-19 tidak memiliki efek samping yang begitu besar pada Kesehatan tubuh. Sudah seharusnya pemerintah daerah kabupaten Muna, melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga bisa membawa pengaruh, atau membentuk opini yang positif di kalangan masyarakat tentang vaksinasi Covid-19.

b. Kejelasan

Kejelasan ini artinya bahwa informasi yang disampaikan harus memiliki kejelasan dan tujuan, sasaran dan aplikasinya sehingga pelaksana kebijakan mempunyai pandangan yang sama terhadap konsep kebijakan tersebut. Ada beberapa kelompok sasaran yang menjadi target vaksinasi, seperti lansia, pelajar, remaja, dan pelayan publik, dan jumlah target secara keseluruhan ada sekitar 169.000, dan patokan tercapainya target vaksinasi yaitu harus sebanyak 70% dari keseluruhan jumlah target yang telah ditetapkan. Dalam menangani angka vaksin yang kemarin belum mencapai target, pemerintah kabupaten muna melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada masyarakat, dengan melakukan sosialisasi di sekolah - sekolah, dan kunjungan ke tokoh - tokoh agama dan masyarakat yang ada di kabupaten Muna. Dengan harapan bisa membawa pengaruh baik kepada masyarakat lain. Pemerintah kabupaten muna juga menerapkan program cek kartu vaksin, program ini dilaksanakan di tempat – tempat umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat kabupaten Muna, yaitu di pasar, di Pelabuhan, dan di perbatasan - perbatasan kabupaten Muna dengan kabupaten Muna barat, kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kartu vaksin masyarakat. Secara tidak langsung mobilisasi masyarakat memang sangat membutuhkan kartu vaksin.

c. Konsistensi

Konsistensi yakni tidak adanya perubahan atau, penerapan secara berkala dan terus menerus terhadap suatu konsep kebijakan, sehingga dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut. Penyebaran

berita *hoax*, dan isu-isu negatif tentang vaksin juga menjadi tantangan pemerintah kabupaten Muna dalam meningkatkan angka vaksinasi. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Muna, bekerja sama dengan Diskominfo kabupaten Muna, dimana Diskominfo memiliki program unggulan dari pusat untuk mengatasi berita – berita *hoax* tentang vaksin Covid-19, yaitu melalui *soft approach*, dengan memperkuat masyarakat lewat literasi digital agar tidak mudah percaya terhadap suatu informasi. Kedua melalui *hard approach*, bisa berupa pemblokiran hingga penegakan hukum. peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital bertujuan membekali masyarakat untuk mengetahui, membedakan, dan mengambil tindakan yang tepat dalam menangani *hoax*. Tidak hanya itu, pemerintah kabupaten Muna juga bekerja sama dengan platform media sosial yang ada di kabupaten Muna, yaitu *munahits*, dan *info.muna*, dengan inovasi – inovasi teknologi dalam menangani berita *hoax* yang ada di internet.

3.2. Sumber Daya

a. Staf

Staf yang mencukupi dan memiliki *skill* yang memadai untuk melaksanakan tugas dalam penerapan suatu kebijakan. Sumber daya manusia atau disebut juga sebagai orang yang melaksanakan rencana terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan dan kompetensi personel yang dimiliki oleh tim kesehatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Tim Kesehatan yang dibentuk, bekerja sama dengan TNI POLRI, sehingga memperluas tingkat kinerja dari tim Kesehatan yang sudah dibentuk, selain itu juga bekerja sama dengan lembaga - lembaga yang lain seperti PGRI, dan juga STIP MUNA. Ini sudah sangat cukup dalam mendukung program vaksinasi di kabupaten Muna.

b. Informasi

Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, dan juga penanganan terhadap kendala yang dihadapi, sehingga implementor dapat mengetahui hal yang perlu dilakukan. Distribusi vaksin Covid-19 di kabupaten Muna bersumber dari provinsi, dan juga dari TNI POLRI, yang keseluruhan stok vaksin yang masuk, penyimpanannya di freezer dinas Kesehatan kabupaten Muna. Ada 3 jenis vaksin yang digunakan, yaitu *Sinovac*, *Moderna*, *pfizer* dan *Astrazeneca*. Stok yang didistribusikan dari provinsi menyesuaikan dengan jumlah stok vaksin yang ada di kabupaten Muna, Ketika stok sudah mulai menipis, maka permintaan stok vaksin akan diajukan ke provinsi, setelah itu pemerintah kabupaten Muna berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, mengenai distribusi akan dilakukan dengan pengiriman langsung, ataupun dilakukan penjemputan dari kabupaten Muna.

c. Fasilitas

Fasilitas meliputi, sarana dan prasarana baik anggaran maupun bangunan, yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan suatu kebijakan. Pelaksanaan vaksinasi covid-19 di kabupaten muna, dilaksanakan di puskesmas. Jumlah puskesmas di kabupaten Muna terhitung sebanyak 30 puskesmas, dan 1 Rumah Sakit Umum, 30 puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan, dan ada

beberapa kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas. puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan ini yang merupakan tempat posko vaksinasi covid 19, selain itu ada beberapa posko tambahan yang terletak di beberapa tempat seperti, Pelabuhan, perbatasan kabupaten, dan di bandara. Dalam rangka penanganan covid 19 di kabupaten muna, anggaran yang digunakan adalah dana dari kementerian kesehatan, dalam bentuk Bioka non fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan non fisik, berupa insentif tenaga Kesehatan untuk pencarian penderita, seperti Dokter, Perawat, tenaga survei suprasional. Namun karena bantuan dari kementerian dinilai masih belum cukup untuk menangani masalah covid 19, maka dilakukan refocusing – refocusing anggaran dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penanganan covid 19 di kabupaten muna. dipahami bahwa pelaksanaan vaksinasi dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya yang diperoleh kabupaten muna berasal dari bantuan kementerian Kesehatan dalam bentuk Bioka non fisik, namun masih belum cukup untuk penanggulangan covid 19 di kabupaten muna, sehingga pemerintah daerah kabupaten muna, melakukan refocusing – refocusing anggaran, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya dalam penanggulangan covid 19 di kabupaten muna.

3.3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku program untuk melaksanakan program dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan atau program merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi yang penting bagi implementasi kebijakan itu, maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Hal yang penting adalah bagaimana pemerintah daerah mampu memiliki inovasi dalam mengatasi hal baru yang terjadi di masyarakat. Dinas Kesehatan kabupaten muna, dalam mendorong pelaksanaan program vaksinasi, berupaya untuk bekerja sama dengan Lembaga maupun organisasi masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan vaksinasi covid 19 di kabupaten Muna. Lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi seperti PGRI, STIP Muna, dan SCOUT, mereka bekerja sama, bersama dengan dinas Kesehatan kabupaten muna dalam menggalang masyarakat untuk mengikuti vaksinasi covid 19. Terlibatnya organisasi masyarakat dan juga Lembaga Pendidikan, membentuk mindset masyarakat kabupaten muna, bahwa vaksin covid 19 tidak berbahaya, seperti berita - berita yang mereka lihat di sosial media dan internet. Partisipasi dari organisasi – organisasi masyarakat sangat membawa dampak yang sangat besar, terutama di bulan November – desember 2021. Mereka mampu mengajak masyarakat, yang mana adalah kerabat, teman, dan keluarga mereka, untuk melaksanakan vaksin covid 19. Hal ini membuat angka vaksinasi meningkat. Dapat dipahami bahwa kecenderungan untuk mencapai tujuan satu kebijakan dari pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan kebijakan. Tujuan suatu program atau kebijakan akan tercapai ketika masyarakat dan pelaksana kebijakan memenuhi peran masing – masing dengan baik.

3.4. Struktur Birokrasi

a. SOP (*Standard Operating Procedures*)

Aspek struktural paling dasar yakni standar operasional prosedur (SOP) dimana digunakannya SOP yang baik maka pelaksanaan dapat mengatur dan menyeragamkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Semua SOP yang bersangkutan dengan pelaksanaan Vaksinasi di kabupaten Muna sudah diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi covid 19. semua kegiatan yang berkaitan dengan vaksinasi covid 19 sudah ada SOPnya, dan petunjuk pelaksanaan yang sudah dirapatkan sesuai keputusan Menteri Kesehatan, SOP ini juga sudah diberikan kepada seluruh petugas atau tim vaksinasi, sehingga seluruh pihak yang bertugas sudah mengetahuinya.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah, pemihakan di antara beberapa unit organisasi. Dalam pelaksanaan program vaksinasi covid-19 yang dilakukan pemerintah kabupaten Muna, pembagian tanggung jawab dilakukan berdasarkan kelompok dari instansi kerja masing - masing seperti TNI, POLRI, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga Tim dari Dinas Kesehatan, yang bersinergi dalam penyelenggaraan program vaksinasi covid-19 di Kabupaten Muna. Jadi dapat dipahami bahwa tim vaksinasi covid 19 yang dibentuk dinas Kesehatan, sudah melaksanakan tugas berdasarkan dengan SOP yang telah ditetapkan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi. Hal ini bisa terjadi karena pembentukan tim vaksinasi covid 19 yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, melibatkan banyak pihak.

3.5. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Muna dalam melaksanakan Program Vaksinasi Covid-19

Masyarakat kabupaten Muna, masih kental dengan kepercayaan tradisional, yang secara turun - temurun menjadi kepercayaan yang ada di masyarakat. Kepercayaan ini yang menjadi kendala pemerintah kabupaten muna, dalam melaksanakan Program Vaksinasi Covid 19. Banyak masyarakat kabupaten Muna yang percaya, bahwa dengan men gkonsumsi sayur daun kelor, akan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi selama mereka masih mengkonsumsi sayur daun kelor, mereka merasa bahwa akan sehat. Kepercayaan masyarakat, yang juga masih belum berkembang, dan masih belum sadar dengan bahaya dari Covid 19. Hal ini memang perlu mendapatkan perhatian khusus, dari pemerintah Kabupaten Muna, bagaimana agar masyarakat mau menerima Vaksin Covid 19, sehingga penyebaran covid 19 dapat segera ditangani

Wilayah kabupaten Muna merupakan wilayah kepulauan, yang tersebar pulau - pulau kecil disekitarnya, ada sekitar 22 Pulau yang berpenghuni, 10 pulau yang berpenghuni sementara, dan 200

lebih pulau tak berpenghuni. Masyarakat yang tinggal di pulau - pulau kecil, yang berada di sekitar pulau kabupaten muna, susah untuk mendapatkan akses khususnya di bagian transportasi untuk bisa ke pulau Muna. Ini menjadi kendala sekaligus tantangan, bagi pemerintah kabupaten Muna dalam penyaluran Vaksin Covid 19 di pelosok kepulauan yang ada di kabupaten Muna. Masyarakat yang ada di pelosok kepulauan, mempunyai pola pikir bahwa, kartu vaksin tidak akan berguna bagi kehidupan mereka, yang hanya tinggal di pulau tersebut, tanpa pergi kemana – mana. Selain itu mereka juga pernah mendapat kabar bahwa adanya korban jiwa karena efek samping setelah penyuntikan vaksin covid 19.

Di era pandemi covid saat ini, sangat banyak berita – berita atau isu tentang vaksin covid 19. Hoax menjadi salah satu kendala bagi pemerintah kabupaten Muna dalam pelaksanaan program Vaksinasi Covid 19. Penyebaran berita hoax ini terjadi karena, mudahnya akses informasi, dan penyebaran yang dilakukan di media sosial seperti Instagram, facebook dan whats up. Kurangnya literasi dan wawasan masyarakat kabupaten Muna terhadap vaksin Covid 19, membuat masyarakat semakin yakin dengan berita yang mereka lihat, tanpa mencari tahu kebenaran dari berita tersebut. Ada banyak isu atau berita tentang vaksin covid 19 yang tersebar di kalangan masyarakat kabupaten Muna sehingga Pemerintah daerah kabupaten Muna perlu mengambil Tindakan dalam mengatasi hal ini.

3.6. Tindakan Pemerintah Kabupaten Muna untuk mengoptimalkan Program Vaksinasi Covid-19

Salah satu kendala yang dihadapi yaitu, budaya masyarakat Muna yang masih percaya terhadap kepercayaan leluhur. Pemerintah kabupaten Muna melakukan pendekatan kepada tokoh – tokoh masyarakat, dan memberikan pemahaman kepada tokoh masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyebaran covid 19 melalui vaksinasi. Pendekatan kepada tokoh masyarakat merupakan cara yang tepat dilakukan, untuk mempengaruhi masyarakat kabupaten muna, termasuk masyarakat adat yang berada di bagian perkampungan.

Wilayah kabupaten muna yang sangat luas, serta kondisi geografisnya yang merupakan kepulauan, membuat pemerintah daerah perlu kerja ekstra, sehingga masyarakat yang ada di pelosok bisa mendapatkan vaksin covid 19. Selain itu minat masyarakat yang kecil untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi. Dalam mengatasi kendala tersebut, pemerintah kabupaten Muna bekerja sama dengan TNI POLRI, serta peran dinas Perhubungan dalam penyediaan transportasi laut. Untuk menyalurkan vaksin covid 19 di daerah kepulauan, kami bersama dengan dinas perhubungan dibantu oleh TNI POLRI, melakukan penambahan titik vaksin, yang tersebar ke pulau - pulau terdekat dengan pulau Muna. Tidak hanya itu, pemerintah daerah kabupaten Muna, menerapkan syarat tambahan sebagai penerima BLT, ataupun bantuan lainnya, harus memiliki kartu vaksin covid 19. Dengan demikian, masyarakat yang akan menerima bantuan, terlebih dahulu harus melaksanakan vaksin. Penyebaran titik vaksinasi dilakukan selain di daerah kepulauan, juga di area pinggiran kabupaten atau perbatasan kabupaten Muna dengan Kabupaten Muna barat, ada

pemeriksaan kartu vaksin covid 19, Ketika masuk ke area kabupaten muna, jika ada masyarakat yang belum melaksanakan vaksin, maka bisa langsung di vaksin, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Selanjutnya ialah penyebaran berita hoax di internet dan media sosial. Sudah terdapat sebanyak 206 hoax vaksinasi yang tersebar di berbagai platform media sosial. Dinas Kesehatan dan dibantu dengan Dinas komunikasi dan informasi kabupaten muna, sudah melakukan beberapa Tindakan dalam menangani masalah ini, yaitu melakukan sosialisasi dengan melibatkan Lembaga Pendidikan dan organisasi masyarakat. Mereka menggalang masyarakat baik teman, rekan kerja, keluarga dan sahabat, untuk datang melaksanakan vaksinasi. Dinas komunikasi dan informasi kabupaten Muna, juga menerapkan program pusat, yaitu dari kementerian komunikasi dan informasi Republik Indonesia, dalam mengatasi hoax tentang vaksinasi. Program unggulan tersebut merupakan dua pendekatan, yang pertama, pendekatan soft approach, yaitu memperkuat wawasan masyarakat, lewat literasi digital agar tidak mudah percaya terhadap suatu informasi. Program ini diselenggarakan, setidaknya melalui 2000 pelatihan berdasarkan modul dan kurikulum berdasarkan empat pilar literasi digital, yaitu digital ethics, digital safety, digital skill, dan digital culture. Pendekatan yang kedua yaitu, hard approach, pendekatan ini bisa berupa pemblokiran konten hoax dan konten negatif, dan penegakan hukum. Pendekatan ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah pusat, yaitu tim AIS Ditjen Aptika, mereka melakukan patrol siber selama 24 jam tanpa henti. Masyarakat difasilitasi untuk memberikan aspirasi, dan aduan, mengenai konten – konten hoax yang ditemukan, pemblokiran situs di internet yang dilakukan tim Ais Ditjen Aptika dilandasi dasar hukum berupa UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE, PP 71 tentang PSTE, dan Permen Kominfo No.5 Tahun 2020 tentang PSE lingkup Privat.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan tingkat kesembuhan dari pandemi Covid-19 yang telah banyak memakan korban dan akibatnya banyak yang terkena imbas hingga mengakibatkan korban meninggal dunia serta faktor lainnya yang terdampak seperti perekonomian salah satu contohnya seperti halnya dalam penelitian Idil Akbar yakni perspektif ekonomi politik nasional pada dasarnya memandang negara sebagai pusat dari berbagai kelompok kepentingan (swasta), dan masyarakat menjadi kepentingan nasional. Kebijakan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga bisa dijadikan sebagai role model bagi wilayah-wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara karena sudah cukup berjalan dengan baik. Penulis menemukan temuan penting yakni turut aktifnya Pemerintah Kabupaten Muna dalam menjalankan Kebijakan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19), serta adanya dukungan dari pihak pemerintah lainnya baik dari lintas lembaga atau dinas lintas vertical maupu horizontal yang saling bekerja sama dalam menanggulangi peningkatan Covid-19. Sama halnya dengan temuan M. Akbar, dkk bahwa Pemerintah dalam menjalankan kebijakan Vaksinasi

Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Surabaya telah cukup memenuhi juga seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Kunci berjalannya kebijakan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) dalam menanggulangi Covid-19 di Kabupaten Muna ialah dengan penegasan kebijakan yang telah dibuat serta tindakan-tindakan yang dilakukan secara serentak oleh Lembaga terkait dalam menanggulangi pandemi ini.

Layaknya kebijakan lainnya, kebijakan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Muna ini juga masih memiliki beberapa kendala, diantaranya adalah yaitu budaya kepercayaan masyarakat kabupaten Muna dan kondisi geografis kabupaten Muna serta penyebaran berita hoax tentang vaksinasi. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Muna coba melakukan upaya untuk menindaklanjuti kendala yang terjadi tersebut, yakni dengan berupaya pendekatan kekeluargaan Bersama tokoh tokoh masyarakat dan agama, penambahan jumlah titik vaksinasi, menjalankan program dari pemerintah pusat, dalam mengatasi hoax vaksin covid 19 melalui 2 pendekatan, yaitu *soft approach* memperkuat wawasan masyarakat, lewat literasi digital, dan yang kedua *hard approach*, merupakan, pendekatan yang berupa pemblokiran konten hoax dan konten negatif, dan penegakan hukum. Keberhasilan upaya tersebut memang harus direncanakan sedemikian rupa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik serta dapat mengurangi peningkatan bahkan mencegah penyebaran Covid-19 seperti halnya dalam penelitian Susi Artuti Erda Dewi.

Adanya kebijakan ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu mengurangi bahkan menghilangkan kasus pandemi Covid-19 di Kabupaten Muna bahkan juga implementasi ini dapat dipergunakan dan dilaksanakan oleh daerah lainnya yang mengalami permasalahan yang sama terkait pelonjakkan kasus pandemi Covid-19 ini.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Implementasi program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Muna, dilakukan berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19), dapat dikategorikan sudah baik. Beberapa kendala yang terjadi di lapangan yaitu budaya kepercayaan masyarakat kabupaten Muna dan kondisi geografis kabupaten Muna serta penyebaran berita hoax tentang vaksinasi. Dalam menghadapi kendala – kendala yang terjadi di lapangan, Pemerintah kabupaten Muna berupaya pendekatan kekeluargaan Bersama tokoh tokoh masyarakat dan agama, penambahan jumlah titik vaksinasi, menjalankan program dari pemerintah pusat, dalam mengatasi hoax vaksin covid 19 melalui 2 pendekatan, yaitu *soft approach* memperkuat wawasan masyarakat, lewat literasi digital, dan yang kedua *hard approach*, merupakan, pendekatan yang berupa pemblokiran konten hoax dan konten negatif, dan penegakan hukum.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari George Edward III mengenai teori implementasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai implementasi kebijakan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, Kepala Puskesmas, Dokter, beserta tokoh masyarakat serta Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Muna beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Anggara, S. (2014). "*Kebijakan Publik*" Bandung : CV Pustaka Setia
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian ,Suatu pendekatan Praktek. Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipt.
- Dyah dan Arif. (2014). "*Implementasi Kebijakan Otonomi Pelayanan Pendidikan*" dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (Eds.) *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Khasan, Effendi. (2010). "*Memadukan Metode Kuantitatif Dan Kualitatif*". Bandung: CV.Indra Prahasta
- Moleong, L.(2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2014. "*Metode Penelitian*". Bogor: Ghalia Indonesia
- Prof. Dr. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*" Bandung : Alfabeta, CV.
- Sumaryadi. (2005). "*Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*". Jakarta: CV Citra Utama
- Tahir, Arifin.(2014). "*Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*". Bandung: Alfabeta
- Wahab, S. A. (2012). "*ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*". Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Akbar, I. (2021). VAKSINASI COVID 19 DAN KEBIJAKAN NEGARA: PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 244-254.
- Gurning, F. P., Siagian, L. K., Wiranti, I., Devi, S., & Atika, W. (2021). Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 43-50.

Dewi, S. A. E. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. *HEALTH CARE: JURNAL KESEHATAN*, 10(1), 162-167.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19)

